

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PUSPAGA BALAI RW DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA SURABAYA

Putri Desi Andriani ¹, Agus Prianto ²

Universitas Yudharta Pasuruan

Correspondent author: agus.prianto@yudharta.ac.id

Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia

Abstract

Children are a state asset in the future as a generation that will carry the fate of the Indonesian nation. To make the country better and more advanced, it is very necessary to protect Indonesian children from acts of violence and realize gender equality because to bring about a better nation, we need golden generations who are intelligent in knowledge and morals, but in reality, the number of acts of violence against children and the majority of victims being female is always increasing. The Surabaya city government is committed to collaborating with DP3APPKB in carrying out responsive prevention of acts of violence against women and children, through the RW Hall Learning Center which aims to expand services to prevent acts of violence through psycho-educational outreach and counseling in every smallest environment, namely every RW. The method used is qualitative and presented descriptively. The results of this research show that the level of community participation is the main requirement in implementing the vision and mission of the Puspaga Balai Rw program.

Keywords: Community; Level of Participation; Puspaga Balai RW; Prevention of Violence; Women and Children

Abstrak

Anak merupakan asset negara dimasa mendatang sebagai generasi yang membawa nasib bangsa Indonesia, untuk menjadikan negara yang lebih baik dan maju maka sangat diperlukan menjaga anak-anak Indonesia dari tindakan kekerasan dan mewujudkan kesetaraan gender karena untuk membawa bangsa yang lebih baik butuh generasi-generasi emas yang cerdas secara pengetahuan dan moral, namun pada kenyataannya jumlah tindakan kekerasan terhadap anak dan korban mayoritas berjenis kelamin Perempuan selalu mengalami peningkatan . Pemerintah kota Surabaya berkomitmen bekerjasama dengan DP3APPKB dalam melakukan responsive pencegahan tindakan kekerasan terhadap Perempuan dan anak, melalui Pusat Pembelajaran Balai RW yang bertujuan untuk melebarkan sayap pelayanan mencegah tindakan kekerasan melalui sosialisasi psiko-edukasi dan konseling di setiap lingkungan paling kecil yakni setiap RW. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini tingkat partisipasi masyarakat yang menjadi kebutuhan utama dalam terlaksananya visi dan misi program puspaga balai Rw.

Kata Kunci: Puspaga Balai RW; Tingkat Partisipasi; Masyarakat; Pencegahan Kekerasan; Perempuan dan Anak

PENDAHULUAN

Angka korban kekerasan terhadap anak meningkat setiap tahunnya. KEMEN-PPPA No.2 Tahun 2022 menjelaskan Kekerasan terhadap anak merupakan semua bentuk kekerasan fisik dan mental, tindakan ancaman dan paksaan, tindakan penganiayaan dan penelantaran, tindakan eksploitasi dan penyalahgunaan seksual. Perpres No.25 tahun 2021 menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan, selain itu kota layak anak harus dapat melindungi hak-hak anak sehingga hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga harus mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kota Surabaya meraih penghargaan kota layak anak kategori utama sebanyak lima kali berturut dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), namun pada kenyataannya berbeda dengan fakta yang ada, jumlah kekerasan terhadap anak kota Surabaya setiap tahun mengalami peningkatan.

Berdasarkan data kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, data 1 Januari 2024 berjumlah 4.521 kekerasan anak terjadi di Indonesia dan provinsi Jawa timur di awal januari peringkat kedua dengan jumlah kekerasan 533 kasus, kota Surabaya menduduki peringkat pertama dengan jumlah kekerasan tertinggi di Jawa timur, 338 kasus kekerasan terjadi di lingkungan keluarga, Paling banyak korban berusia 13-17 tahun, korban kekerasan paling tinggi 80,1% berjenis kelamin Perempuan dan 88,2% pelaku berjenis kelamin laki-laki. Surabaya merupakan wilayah metropolis yang memiliki jumlah kasus kekerasan anak yang terus meningkat setiap tahunnya, bahkan sampai beredar di berbagai media pemberitaan bahwa Surabaya darurat kekerasan seksual dan anak. Selain informasi tersebut juga dapat dibuktikan dengan data dari kementerian pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak berikut jumlah kekerasan terhadap anak di Surabaya 5 tahun kebelakang.

Tabel 1. Jumlah kasus kekerasan kota Surabaya tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan
2019	294
2020	278
2021	145
2022	180
2023	274

Sumber: Kementerian

Perlindungan Perempuan dan Anak, 2024

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian kecil kasus yang dilaporkan, kenyataannya di lapangan banyak kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang-orang terdekat yang tidak dilaporkan. Kekerasan terhadap anak juga dapat terjadi karena perilaku salah yang dilakukan orang tua, pengasuh dan lingkungan (Asy'ary, 2021). Banyak kasus

kekerasan terhadap anak yang tidak terungkap dikarenakan adanya ancaman, intimidasi serta dianggapnya aib keluarga sehingga ada rasa takut dan malu untuk melakukan pelaporan. Menyikapi kasus kekerasan terhadap anak dengan realita di lapangan seperti gunung es yang harus direspon dengan upaya hadirnya negara.

Upaya mencegah kekerasan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar menjadi pusat utama dalam pencegahan kekerasan terhadap anak, maka perlu adanya pemahaman edukasi dalam melakukan pengasuhan dan kewaspadaan terhadap tindakan yang berdampak kekerasan. Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak membuat program pusat pembelajaran keluarga (Puspaga) sebagai kebijakan responsif dan representative dalam pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai implementasi UU No.23 Tahun 2014 dalam pemenuhan hak anak dan kesetaraan gender. Sesuai dengan keputusan wali kota Surabaya nomor: 188.45/144/436.1.2/2022 di bentuknya tim pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) berada dinaungan dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dengan memberikan pelayanan edukasi dan konseling. Perpres No.25 tahun 2021 untuk menciptakan kota layak anak, pemerintah kota Surabaya melebarkan sayap upaya pencegahan kekerasan dengan membuat kebijakan bersifat *top down* berupa pelayanan puspaga balai RW dengan visi terwujudnya keluarga yang berkesetaraan gender dan sesuai hak anak dan memiliki misi 1. Memberikan layanan konsultasi, konseling bagi umum maupun keluarga anak berkebutuhan khusus (ABK). 2. Meningkatkan dan menerapkan prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak. 3. Memberikan layanan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) terkait konveksi hak anak, pengasuhan positif atau pengasuhan berbasis anak, ketahanan keluarga, pencegahan perkawinan dini, dukungan psikologi awal, dan dukungan kesehatan mental. 4. Memberikan layanan sosialisasi, edukasi dan bimbingan masyarakat agar terbentuk keluarga yang harmonis dan terjalin hubungan yang serasi antar seluruh anggota keluarga baik ayah, ibu, anak atau anggota keluarga lain dalam rumah tangga.

Program Puspaga balai RW yang di RW 03 Kedungdoro kecamatan Tegalsari kota Surabaya, yang diselenggarakan pemerintah kurang optimal melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan implementasi puspaga balai RW sampai evaluasi. Sehingga terjadi kesenjangan persepsi antara pemerintah dan masyarakat, permasalahan tersebut tidak mencerminkan nilai demokrasi dalam penyelenggaraan tata kelola pelayanan public yang inklusivitas (pelibatan), nilai transparansi, nilai akuntabilitas, dan nilai integritas (Rachmawati & Nasution, 2015) oleh sebab kesenjangan berakibat rendahnya tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam implementasi program puspaga balai RW, karena sebenarnya dalam proses implementasi puspaga peran pemerintah lebih besar dalam wujud regulasi yang formalitas dan cenderung kurang memberikan ruang keleluasaan

kepada masyarakat secara optimal. Minimnya partisipasi masyarakat juga disebabkan oleh budaya masyarakat Jawa yang identik dengan Patronklien yang menjadi faktor penambah partisipasi rendah dengan menciptakan partisipasi semu (Prianto, 2018) hal ini menjadi tingkat partisipasi masyarakat menjadi rendah atas sistem pengawasan program puspaga sebagai mendukung program lingkungan layak anak dan meminimalisir terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak, maka upaya pencegahan kekerasan terhadap anak perlu dilakukannya kolaborasi serta melibatkan peran pemerintah, masyarakat, sekolah, keluarga dan individu, (Nurjaini & Harahap, 2023) perihal tersebut konsekuensi atas nilai menjadi internalisasi dalam penyelenggaraan pelayanan public.

Puspaga kota Surabaya dalam memberikan pelayanan berkolaborasi dengan mahasiswa magang dan volunteer, psikiater, kelurahan sampai ke tingkat RW. Dengan begitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak bermitra dengan program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) yang berperan sebagai fasilitator puspaga balai RW serta melibatkan masyarakat dalam prosesnya, respon masyarakat dalam berpartisipasi untuk mengimplementasikan dan mendukung program puspaga dalam pencegahan kekerasan terhadap anak sangat berpengaruh untuk mewujudkan visi dan misi program puspaga itu sendiri, (Mulyantika & Adi, 2021).

Meskipun program puspaga balai RW dibuat secara *top down* tetapi juga dilakukan dengan cara *bottom-up* dimana membutuhkan partisipasi masyarakat dalam proses dan evaluasi penerapannya. Partisipasi masyarakat merupakan bagian keterlibatan masyarakat secara sadar dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan evaluasi (Mulyantika & Adi, 2021) tentunya keberadaan masyarakat dalam memberikan *feedback* program pemerintah atas kesesuaian output dan impact (Bancin, 2011).

Partisipasi masyarakat merupakan cermin dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan penyelenggaraan program pemerintah, (Tedja, 2020). Partisipasi dalam pemerintahan adalah dianggap sebagai cara untuk desentralisasi dan meningkatkan partisipasi publik dalam urusan pemerintah, Desentralisasi wewenang bertujuan untuk melakukan devolusi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan atau proses organisasi (Dong, L 2015) Partisipasi masyarakat merupakan perilaku secara sukarela yang masyarakat berikan dalam proses implementasi program, dimana semakin tinggi tingkat partisipatif masyarakat semakin tinggi tingkat kemanfaatannya.

Pada kenyataannya keterlibatan masyarakat di RW 03 Kedungdoro masih kurang optimal. Wilayah RW 03 Kedungdoro berada di pusat kota Surabaya yang merupakan kota industrialis sehingga masyarakat memiliki tipe budaya yang heterogen dengan tingkah-laku warga masyarakat yang kontra-produktif dan mementingkan diri sendiri dan kelompok-

kelompoknya (Kistanto, 2018) serta masyarakatnya tipikal *gesellschaft* yang dimana mereka akan melakukan sesuatu jika memiliki nilai dan keuntungan kepada dirinya sendiri, masyarakat *gesellschaft* memiliki ciri-ciri hubungan sosial bersifat kontraktual, individualis, tindakan sosial berdasarkan komando. Tipikal masyarakat *gesellschaft* dapat mempengaruhi terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan program, yang dimana mereka akan ikut serta jika mereka mendapatkan nilai dan membutuhkan program tersebut, sehingga rasa tertarik untuk mengikuti kegiatan sosialisasi edukasi dalam kelas parenting masih sangat kurang terbukti dalam daftar hadir peserta kelas parenting paling banyak hanya 20 orang itupun yang menjadi peserta hanya mereka sebagai pekerja sosial di wilayah RW 03 Kedungdoro.

Menilik dari penjelasan di atas dapat diartikan masyarakat yang mengikuti kegiatan dalam program puspaga hanya untuk memenuhi tanggung jawab sebagai pekerja sosial, sedangkan masyarakat menganggap program puspaga bukan suatu kebutuhan primer dalam pencegahan kekerasan perempuan dan anak di kota Surabaya maka perlu melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam merespon program Puspaga Balai RW dalam pencegahan kekerasan Perempuan dan anak Cohen dan Uphoff. 1977 dalam (Indreswari et al., 2019) untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam tingkat partisipasi pada proses pengambilan keputusan, tingkat partisipasi pada pelaksanaan, tingkat partisipasi pada pengambilan manfaat dan partisipasi pada evaluasi program puspaga. Berdasarkan uraian tersebut, menganalisa "Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Puspaga Balai RW Upaya Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Surabaya" guna menciptakan pelayanan public dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada anak dan perempuan dapat berjalan dengan baik.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, (Kadji, 2016). Metode kualitatif dengan dengan pendekatan deskriptif, Neuman dalam, (Mulyantika & Adi, 2021) memiliki kecocokan dalam meneliti secara detail suatu program, peristiwa, proses, maupun sekeompok individu serta sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu partisipasi masyarakat RW 03 Kedungdoro terhadap program puspaga upaya untuk mencegah kekerasan anak di kota Surabaya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan secara langsung, wawancara, dokumentasi. Adapun data skunder dan informasi lainnya peneliti memperoleh melalui studi pustaka berupa jurnal dan catatan-catatan, booklet puspaga, website dan catatan-catatan dari pihak terkait. Selain itu data diperoleh melalui teknik analisis data menggunakan model interaktif, Miles & Huberman dalam (Kadji, 2016) komponen-komponen model interaktif yakni reduksi data, penyajian

data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Kondensasi data mengacu pada proses pemelihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan tranformasi data, (Elwan et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pusat pembelajaran keluarga (Puspaga) balai RW kota Surabaya merupakan salah satu program pemerintah kota Surabaya, sebagai upaya untuk mencapai kota layak anak, dimana pemerintah memberikan pelayanan psiko-edukasi dan konseling untuk pencegahan kekerasan Perempuan dan anak yang dapat mempengaruhi terwujudnya keluarga yang berkesetaraan gender dan sesuai hak anak. Implementasinya tidak luput butuh responsif dukungan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengambilan keputusan pelaksanaan program untuk merumuskan kegiatan psiko-edukasi yang efektif dan efisien, tepat sasaran, tepat waktu dan megakselerasikan keterpaduan visi dan misi dari program puspaga itu sendiri dengan kultur di masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk secara sadar mendiskusikan tanggapan atau tawaran terhadap program yang ditawarkan keseluruhan tahapan dalam partisipasi masyarakat untuk membangun dukungan dan kepercayaan kepada masyarakat, membangun relasi yang luas, mempersiapkan kader-kader lokal upaya membangkitkan nilai-nilai sosial untuk menjahui tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti; menstimulan tindakan bersama (gotong royong) melindungi potensi dan korban tindakan kekerasan, menyelenggarakan pendidikan *parenting* pola asuh yang sehat, dan pencegahan tindakan kekerasan yang memhami prosedur dan tindakan pelaporan pada aksi kekerasan. Tujuan demikian menjadi tujuan implementasi program puspaga balai RW yang menekankan pendekatan partisipatif masyarakat.

Pendekatan partisipatif digunakan supaya masyarakat menjadi pelaku utama dalam pengambilan keputusan untuk pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lokasi RW 03 Kedungdoro berada di pusat kota Surabaya saat ini kondisi sosial masyarakatnya tipikal patembayan (*gesellschaft*) dan mereka kebanyakan individualis dengan kesibukan kerja masing-masing karena memang kebanyakan masyarakat industrialis, modern dan masyarakat urbanisasi. Sikap sosial masyarakat dalam ikut serta menjaga lingkungan dari kekerasan kepada perempuan dan anak untuk tidak takut lapor, dan tidak menganggap abai sangat perlu ditingkatkan. partisipasi menjadi sebuah proses pembentukan kekuatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, (Nahrowi, 2022). Tingkat partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi terciptanya kota layak anak dengan terlaksananya program pusat pembelajaran keluarga secara efektif, efisien, dapat diterima di masyarakat dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

menurut pendapat Cohen dan Uphoff dalam (Indreswari et al., 2019) memberikan rumusan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yakni;

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan pelaksanaan program Puspaga balai RW.

Tahapan pengambilan keputusan pelaksanaan program Puspaga balai RW 03 Kedungdoro yaitu melalui musyawarah penyusunan perencanaan pelaksanaan program. Partisipasi perencanaan program melalui musyawarah, pada proses musyawarah ide dan usulan dari masyarakat sangat penting, dengan adanya perencanaan pelaksanaan program akan memberikan kerangka kerja yang dapat menjadi acuan oleh fasilitator dan semua pemangku kepentingan termasuk warga belajar mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dalam permasalahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungannya, bentuk partisipasi masyarakat dalam tahapan ini dapat dilakukan dengan kehadiran dalam rapat, diskusi, menyumbangkan ide pikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang di tawarkan (Hermawan & Suryono, 2016).

Pengambilan keputusan perencanaan pelaksanaan program puspaga balai RW 03 Kedungdoro dilakukan dengan diskusi musyawarah bersama dengan fasilitator puspaga yang dihadiri oleh ketua dan anggota RW, ketua PKK, ketua kader Surabaya hebat, petugas taman baca masyarakat RW 03 Kedungdoro bertempat di balai RW 03 Kedungdoro. Dalam proses ini sangat penting karena adanya dialog antara fasilitator puspaga dengan masyarakat RW 03 didalam pengambilan keputusan yang matang untuk program puspaga dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran sebagai upaya motedo pendidikan orang dewasa agar mereka mampu belajar dengan efektif namun belum secara holistic model pembelajaran di Puspaga mampu memberikan pendidikan orang dewasa secara fisik, secara hukum, secara sosial dan mental. Pentingnya pola pendidikan orang dewasa terlebih yang proses pendidikan dan pembelajaran bertema kekerasan pereumpuan dan anak, jelas metode pembelajaran tidaklah sama dengan pembelajaran bagi anak-anak. sebab karakteristik pembelajaran bagi orang dewasa (Mau et al., 2022) meliputi; (1) pembelajaran orang dewasa lebih pada proses pendewasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan; (2) bentuk eksperimen, diskusi, pemecahan masalah, latihan, simulasi dan praktik lapangan agar memperoleh pemahaman dan kematangan diri; (3) untuk memecahkan masalah kehidupannya *problem solving*; dan (4) peningkatan kompetensi dititikberatkan pada pembelajaran dari kegiatan yang dilakukan.

Selain itu, model pembelajaran dalam Parenting Puspaga hanya sebatas disepakati konsep dan waktu pelaksanaan program kegiatan Puspaga balai RW 03 Kedungdoro tahap selanjutnya adalah pelaksanaan program tanpa ada inovasi pembelajaran berbasis IT,

sebab pendidikan orang dewasa perlu berupaya pendidikan secara *continue* agar isu dan problem serta modus kekerasan anak dan perempuan selalu di pahami dan disadarinya.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan program puspaga

Tahap partisipasi pelaksanaan program merupakan inti terpenting untuk dapat melihat suatu keberhasilan program adalah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Implementasi partisipasi masyarakat seharusnya masyarakat tidak hanya menjadi objek dari kebijakan pemerintah, tetapi harus dapat mewakili kepentingan masyarakat. nurWujud nyata partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan yaitu secara sukarela memberikan sumbangsih materi dan non materi baik berupa pemikiran dan keterlibatan masyarakat terhadap terlaksananya program (Sulistiyorini et al., 2015). Partisipasi masyarakat berupa materi dengan menyediakan tempat secara sukarela untuk kegiatan puspaga, fasilitator puspaga bekerjasama dengan alat-alat untuk mendukung terlaksananya sosialisasi secara sukarela untuk sosialisasi puspaga, membawa makanan ringan, ketua dan anggota rw menyediakan alat-alat kebutuhan untuk menunjang kegiatan sosialisasi dan air mineral gratis secara sukarela untuk dibagikan kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan program puspaga. Selain berpartisipasi berupa materi, anak-anak hingga orang dewasa juga ikutserta memberikan partisipasi non materi berupa tenaga dan pikiran.

Responsif masyarakat yang aktif ikut serta berpartisipasi dalam proses pelaksanaan program, sehingga proses pelaksanaan program puspaga dapat berjalan dengan kolaborasi antara fasilitator puspaga dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kota layak anak dan berkesetaraan *gender*. Masyarakat berpartisipasi dengan bentuk materi; berupa tindakan kesukarelaan membawa konsumsi untuk dibagikan kepada peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi puspaga, masyarakat secara sukarela menyediakan fasilitas tempat untuk pelaksanaan psiko-edukasi dan konseling, ketua dan anggota rw memberikan izin kepada fasilitator puspaga untuk memakai fasilitas alat-alat di balai rw untuk melakukan pelaksanaan program puspaga.

Partisipasi dalam bentuk non materi juga dilakukan oleh masyarakat berupa tenaga dan pikiran. Partisipasi dalam bentuk tenaga dilakukan masyarakat dengan secara sukarela meluangkan waktu untuk datang mengikuti sosialisasi kelas parenting dan aktif melakukan diskusi hasil dari pembasahan materi kelas parenting, kader-kader Surabaya hebat secara sukarela mengantarkan fasilitator puspaga untuk melakukan promotif pengenalan puspaga secara *door to door*, anak-anak dan remaja sepulang sekolah dapat meluangkan waktunya dengan sukarela untuk datang ke taman baca masyarakat rw 03 kedungdoro mengikuti pembelajaran penjeagan kekerasan dan menghadapi tindakan kekerasan terhadap anak melalui penjelasan fasilitator puspaga dan menggunakan media video edukasi.

Pelaksanaan program puspaga identik dengan dilakukannya upaya pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui layanan sosialisasi, edukasi dan

konseling. Kegiatan pelayanan konseling pada penerapannya sering kali tidak dihiraukan oleh masyarakat ataupun korban, karena masyarakat menganggap melakukan konseling sama saja dengan menceritakan aib kepada orang lain. Sehingga fasilitator puspaga mengalami kesulitan untuk membantu korban dalam menangani masalah traumatik pada diri korban, maka partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program puspaga hanya berjalan secara efektif pada kegiatan sosialisasi dan edukasi saja untuk kegiatan konseling masih perlu di optimalisasikan antara peran partisipasi masyarakat dan fasilitator puspaga untuk tercapainya *one stop service* bagi keluarga yang holistik dalam pencegahan dampak negative kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat program Puspaga.

Partisipasi masyarakat dalam tahap pemanfaatan program puspaga dilakukan setelah terlaksananya program, (Indreswari et al., 2019). Maksudnya adalah masyarakat dan pengurus puspaga terlibat dalam menyikapi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta membangun partisipasi masyarakat dalam keberlanjutan program dan setiap program yang akan datang, untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan program puspaga balai RW adalah keterlibatan aparat pemerintah kelurahan, kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan dan menerapkan program pusat pembelajaran keluarga di kehidupan sehari-hari untuk terciptanya wilayah yang layak anak, masyarakat mampu mengembangkan kegiatan untuk melakukan edukasi pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak (Hafis et al., 2019). Dalam proses pelaksanaan program Puspaga melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, Struktural RW, Ketua RT, Kader Surabaya Hebat, PKK dan lembaga pendidikan. Kelompok yang mendapatkan manfaat langsung adalah orang tua yang mendapatkan pembelajaran parenting secara gratis dan konsultasi terkait pengasuhan secara gratis, anak-anak dan remaja mendapatkan edukasi secara gratis cara melindungi diri dari kekerasan dan bully serta mendapatkan fasilitas konseling gratis untuk korban kekerasan sehingga untuk membantu memiliki kepercayaan diri yang utuh kembali.

Pengambilan manfaat yang positif sebanyak-banyaknya merupakan tujuan dari pelaksanaan program terutama dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tetapi dalam program puspaga balai RW 03 Kedungdoro partisipasi masyarakat dalam menggunakan pelayanan hanya aktif pada pengambilan manfaat kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan dan edukasi *parenting* gratis, bahkan masih belum ada yang menggunakan pelayanan konseling gratis dengan serius baik secara langsung atau online menggunakan akun website SIAPPAK cenderung masyarakat lebih menutup diri untuk diberikan pelayanan konseling gratis. Sehingga partisipasi dalam pengambilan manfaat program puspaga masih kurang optimal serta perlu peningkatan terhadap kesadaran

masyarakat untuk menggunakan pelayanan konseling gratis dalam menangani kecemasan korban kekerasan dan masyarakat yang ingin melakukan pelaporan dengan merasa aman, dengan begitu akan dapat membantu visi terwujudnya keluarga yang berkesetaraan gender dan sesuai hak anak melalui misi memberikan layanan konseling bagi umum maupun anak berkebutuhan khusus dengan menerapkan prinsip non diskriminasi.

Partisipasi dalam evaluasi program Puspaga.

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi adalah tindakan yang dilakukan dengan melibatkan pihak bersangkutan dan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan dalam program Puspaga yang sedang berjalan, dengan kegiatan evaluasi bertujuan untuk mengetahui relevansi program berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Sehingga dapat menentukan dampak positif dan kekurangan untuk melakukan perbaikan dalam mencapai keberhasilan sesuai dengan tujuan yang akuntabel hasilnya dan dapat berkelanjutan, (Hermawan & Suryono, 2016).

Hasil temuan dari penelitian, evaluasi yang dilakukan dalam proses berjalannya kegiatan program puspaga balai rw 03 Kedungdoro dengan membentuk struktural petugas puspaga untuk memonitoring kegiatan berjalan dengan efektif dan berkelanjutan. Dalam proses evaluasi dilakukan setiap pertemuan kelas parenting yang diselenggarakan oleh fasilitator puspaga dengan melibatkan masyarakat. Jenis evaluasi yang dilakukan yaitu diskusi kelebihan dan kekurangan yang berdampak perlu dilakukannya suatu perbaikan dalam sistem pelaksanaan kegiatan program, diskusi dilakukan dengan membuka secara lebar kritik, masukan-masukan yang membangun untuk dilakukan perbaikan secara tepat tanpa menunggu program selesai.

Evaluasi dalam kegiatan puspaga dapat dilihat dengan banyaknya masyarakat yang hanya mengikuti sosialisasi dan edukasi tetapi tidak dalam penerapan berani melakukan pelaporan dan konseling, meskipun pelayanan konseling dilakukan secara gratis. Sehingga program pelayanan puspaga perlu melakukan optimalisasi dalam membangun kesadaran masyarakat dalam melakukan pencegahan kekerasan, dengan cara masyarakat bukan hanya berpartisipasi secara semu dalam kegiatan sosialisasi edukasi melainkan juga harus menerapkan secara serius dalam melakukan sadar pencegahan tindakan kasus kekerasan terhadap diri sendiri, keluarga dan orang-orang sekitar terutama dengan tidak takut melakukan pelaporan serta korban tidak menutup diri dalam melakukan konseling untuk mencegah traumatik yang berlebihan pada diri korban.

Maka partisipasi masyarakat dalam evaluasi program menitik beratkan dalam optimalisasi perbaikan sistem kegiatan program Puspaga baik sosialisasi dan edukasi yang harus terlaksana dengan optimal baik dalam proses kegiatan ataupun implementasi di kehidupan masyarakat, serta perbaikan pelayanan konseling yang harus saling berjalan berdampingan antara peran fasilitator Puspaga dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan

yang bebas dari tindakan kekerasan dan pencegahan trauma yang mendalam terhadap korban.

KESIMPULAN

Tingkat partisipasi masyarakat RW 03 Kedungdoro kota Surabaya dalam program Puspaga merupakan indikator keberhasilan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Partisipasi masyarakat yang tinggi, didorong oleh pendidikan yang baik, mencakup berbagai aspek program Puspaga, meskipun partisipasi masih formalistik. Untuk optimalisasi, diperlukan inovasi dalam edukasi dan konseling, termasuk pendidikan orang dewasa dan E-parenting. Peran aktif masyarakat dalam melapor dan konseling sangat penting untuk mencegah kekerasan. Dengan layanan edukasi, sosialisasi, dan konseling gratis yang serius, Surabaya dapat menjadi kota layak anak dan berkesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy'ary, S. (2021). KEKERASAN TERHADAP ANAK. *Jurnal Keislaman*, 2(2), 178–194.
- Bancin, M. H. (2011). Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (Studi Kasus: Bandung Barat). *Journal of Regional and City Planning*, 22(3), 179. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2011.22.3.2>
- Dong, L. (2015). *Public Administration Theories*. Palgrave Macmillan US. <https://doi.org/10.1057/9781137536426>
- Elwan, M. O. La, Yusuf, M., & Halika, H. O. La. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. *Journal Publicuho*, 5(3), 626–642.
- Hafis, Sopyan, & Afrizal, D. (2019). FAKTOR PENGHAMBAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA. *Jurnal Administrasi Publik & Bisnis*, 1(2), 75–80.
- Hermawan, Y., & Suryono, Y. (2016). Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program-program pusat kegiatan belajar masyarakat Ngudi Kapinteran. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 97–108. <https://doi.org/10.21831/jppm.v3i1.8111>
- Indreswari, R., Kurniawati, D. Y., & Ibad, I. (2019). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN PASAR KUMANDANG. *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.32678/lbrmasy.v5i01.1224>
- Kadji, Y. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Administrasi* (A. H. Susanto, Ed.; 1st ed.). CV BUDI UTAMA.
- Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. (2024, May 10). *Jumlah Kasus Kekerasan Provinsi Jawa Timur*. Kekerasan.Kemenpppa.Go.Id. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Kistanto, N. H. (2018). Transformasi Sosial-Budaya Masyarakat Indonesia. *Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan*, 13(2), 169. <https://doi.org/10.14710/sabda.13.2.169-178>

- Mau, M., Saenom, S., Martha, I., Ginting, G., & Sirait, S. (2022). Model Pembelajaran Orang Dewasa di Era Masyarakat 5.0. *Skenoo : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 2(2), 165–178. <https://doi.org/10.55649/skenoo.v2i2.38>
- Mulyantika, L., & Adi, R. I. (2021). Peran Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kesejahteraan Anak melalui RW Ramah Anak. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(1), 128.
- Nahrowi, M. (2022). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Ekowisata di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan. *GEADIDAKTIKA*, 2(2).
- Nurjaini, & Harahap, M. M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 8(2), 162–173.
- Prianto, A. (2008). No Penguatan Partisipasi Didalam Akuntabilitas Pembangunan Desa. *Publishia Unmer*, 3, 282.
- Rachmawati, T., & Nasution, S. J. (2015). Nilai Demokrasi dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Kantor Imigrasi Bandung. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(2), 133. <https://doi.org/10.22146/jkap.8166>
- Sulistiyorini, R. N., Darwis, S. R., & Gutama, S. A. (2015). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI LINGKUNGAN MARGALUYU KELURAHAN CICURUG. *SHARE SOCIAL WORK JURNAL*, 5(1), 71–80.
- Tedja, N. J. (2020). Partisipasi Masyarakat Sebagai Modal Utama Dalam Perubahan Perilaku di Lingkungan RW Layak Anak. *Jurnal Karya Untuk Masyarakat*, 1(1), 15–36.